

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 menjadikan sistem pemerintahan daerah bertransformasi ke desentralisasi dimana otonomi daerah serta desentralisasi menjadi cikal bakal di Indonesia. Desentralisasi memiliki tujuan untuk memberi kekuasaan penuh pada pemerintah daerah untuk memajemen sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam urusan keuangan daerahnya.

Pengalihan wewenang atas kekuasaan tersebut diiringi dengan pengalih tugas pada bidang perencanaan keuangan atau anggaran publik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas kebijakan yang dibuat untuk kepentingan atas penyediaan pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik atas keuangan daerah dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan daerah dengan mengikuti pada konsep “*money follow function*” dimana besarnya fungsi atau kegunaan yang dialokasikan berdampak pada banyaknya dana masuk pada daerahnya (Subiyantoro, 2013). Pembagian peran pada daerah perlu dilakukan pula pembagian wewenang atas keuangan pada daerah setempat, dimana wewenang tersebut sepenuhnya dialih tugaskan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Pendelegasian atas wewenang dengan tujuan keamanan dari sumber daya keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diatur agar kebutuhan belanja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat dipenuhi dari sumber keuangan yang ada (Rahmawati, 2008). Semakin banyak kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, semakin banyak pula program yang akan dilaksanakan, yang tentu saja memerlukan dana yang lebih besar. Menurut konsep ini, otonomi daerah dan desentralisasi harus dibarengi dengan desentralisasi kekuasaan di bidang pendapatan.

Potensi dalam pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi yang ada dalam daerahnya. Membiayai upaya dalam pembangunan daerah dengan meningkatkan investasi yang bertujuan untuk menjadi daerah yang mandiri dengan meningkatkan pendapatan tersebut yang mana tidak mengandalkan dari dana transfer pusat. Pengoptimalan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan investasi daerah dari segi pendapatan untuk menutupi kebutuhan dari belanja pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Kesenjangan daerah dapat dihilangkan dengan melakukan otonomi daerah yang mana menyalurkan dana oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tiap kabupaten atau kota pada provinsi yang ada di Indonesia dengan dikeluarkannya UU NO. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan.

Dana transfer dari pemerintah dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dalam menopang kebutuhan yang ada di tiap daerah untuk menjalankan wewenangnya. Implementasi desentralisasi fiskal di Kalimantan Utara relatif mengalami nilai yang berfluktuasi di tiap kabupaten / kota pada Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tidak hanya memerlukan transfer dari pemerintah pusat, namun juga dana yang bersumber dari potensi perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Kapasitas PAD sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ekonomi daerah guna memenuhi anggaran daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dengan hasil yang positif (Saragih, 2016). Pemerintah perlu tertuju dalam menguatkan perekonomian lokal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tidak hanya menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai bea dan cukai serta pajak saja.

Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih tergolong belum dikenal dan kaya akan alam. Kalimantan Utara disandang sebagai provinsi termuda ke-34 di Indonesia yang letaknya terdapat di bagian utara Pulau Kalimantan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang Kalimantan Utara. Meski kecil wilayahnya, namun terdiri dari empat kabupaten: Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, dan Bulungan, serta satu kota yakni Kota Tarakan.

Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, yakni adanya hutan yang luas dan sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah. Oleh karena itu, daerah ini sangat menarik bagi investor untuk melakukan investasi di sana. Salah satu keuntungan yang diharapkan dari investasi di sumber daya alam Kalimantan

Utara adalah keanekaragaman hayati, sehingga menjadi tujuan wisata ekotourisme dan konversi yang sangat menarik.

Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perekonomian setempat. Investasi dalam ekstraksi sumber daya alam juga dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur transmisi energi, yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Industri pertambangan dan ekstraksi juga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, sehingga kontribusi pada pertumbuhan perekonomian.

Belanja daerah di Kalimantan Utara memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatkan belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jalur transmisi energi, Kalimantan Utara dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mempercepat pengiriman barang dan jasa. Peningkatan ini dapat meningkatkan kemampuan produksi dan konsumsi, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Belanja daerah untuk industri, seperti pertambangan, perkebunan, dan pengolahan, juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatkan produksi dan penjualan industri, Kalimantan Utara dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, belanja daerah harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, belanja daerah di Kalimantan Utara harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam mengelola belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari beberapa tinjauan diatas, diharapkan desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan serta menyelaraskan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan ini peneliti akan mengangkat judul tentang **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis dapat membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari pendapatan asli daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022?
2. Apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari investasi daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022?
3. Apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari belanja daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini memiliki judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022”, dimana terdapat Batasan-batasan yang penulis tetapkan agar terjadi kesesuaian hasil yang diinginkan. Pembatasan masalah tersebut meliputi:

1. *Pertama*, wilayah yang digunakan adalah kabupaten atau kota pada Provinsi Kalimantan Utara.
2. *Kedua*, desentralisasi fiskal disini di tinjau dari (pendapatan asli daerah, investasi daerah dan belanja daerah)
3. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi daerah

#### **D. Tujuan**

Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang diteliti, dimana tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari pendapatan asli daerah, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Menganalisis apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Menganalisis apakah desentralisasi fiskal yang ditinjau dari belanja daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis dan Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau sumber tambahan data bagi pembaca atau pengamat ekonomi dan peneliti lain yang tertarik dalam kajian ini. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan yang tepat, yang berkaitan dengan peningkatan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini ditujukan agar menjadi sumbangan pemikiran terkait mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bagi pemerintah atau instansi terkait di kabupaten / kota Provinsi Kalimantan Utara.